

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan adalah proses perubahan sistem yang direncanakan ke arah perbaikan, pelaksanaan pembangunan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Pembangunan daerah merupakan bagian yang bulat dari pembangunan nasional yang tidak dapat dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. sebagai daerah otonom, daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan kepentingan masyarakat sesuai prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Indonesia merupakan negara kesatuan yang menetapkan prinsip desentralisasi pemerintahan.

Desentralisasi daerah dapat diwujudkan dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah, dengan diberikannya urusan tugas dan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai pedoman yang tertera pada peraturan perundang-undangan otonomi daerah.² Otonomi daerah yang mampu diterapkan dengan baik diharapkan pemerintah daerah semakin mandiri dalam urusan keuangan.

Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 6 menjelaskan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah

² Adiyatma Admaja. dkk, "Analisis Kinerja Daerah Pemerintah Kabupaten Tulungagung Periode 2014-2018" *Journal of Regional Economics Indonesia* Vol. 2 No. 2 Tahun 2021 hlm 67

otonom dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.³ Tujuan pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Otonomi daerah dan desentralisasi di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang sesuai azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif dan transparan kepada masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah tersebut dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan komponen utama untuk pemerintahan daerah, APBD berperan dalam instrumen kebijakan. Anggaran daerah berfungsi untuk mengukur pendapatan serta pengeluaran, membantu dalam mengambil keputusan, sebagai perencana pembangunan, mengidentifikasi pengeluaran mendatang, sebagai sarana pengembangan dalam mengukur standar evaluasi kinerja, sistem yang digunakan dalam memotivasi pegawai dan alat yang digunakan untuk berkoordinasi bagi seluruh kegiatan kerja. Penyusunan dan pelaksanaan

³ Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

anggaran harus berfokus pada upaya untuk mendukung pelaksanaan aktivitas dan kepentingan daerah yang bersangkutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.⁴ Permendagri No.77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa pengelola keuangan daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.⁵ Pejabat pengelola keuangan daerah bertanggungjawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingan dan masyarakat daerah tersebut.

Laporan keuangan daerah memberikan gambaran tentang perkembangan anggaran dan realisasi yang digunakan untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan tersebut akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan maka laporan keuangan pemerintah daerah harus disajikan secara tepat waktu, dan dapat diandalkan. Informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan harus dapat dipercaya dan tidak

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

⁵ JDIH BPK RI, "Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

mengandung unsur manipulasi. Selain itu laporan keuangan juga perlu dilengkapi dengan penjabaran yang memadai mengenai informasi-informasi yang dapat mempengaruhi keputusan.

Analisis terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah akan menghasilkan informasi yang penting dalam mengambil keputusan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah dan secara tidak langsung juga dapat menilai keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya. Pengukuran kinerja keuangan sangat penting dalam menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bagaimana uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efektif dan efisien. Menurut Imawan dan Wahyudin (2014) menyatakan bahwa alat ukur yang dapat digunakan dalam analisis kinerja keuangan daerah yakni dengan analisis rasio keuangan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.⁶

Penggunaan analisis rasio keuangan sebagai alat analisis kinerja keuangan secara luas telah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, namun pada lembaga publik khususnya pemerintah daerah masih sangat terbatas sehingga secara teoretis belum ada kesepakatan yang bulat tentang nama dan kaidah pengukurannya. Pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio keuangan terhadap pendapatan belanja daerah perlu dilaksanakan. Beberapa

⁶ Kakung Achmad Sudari, "Kinerja Pengelolaan Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan Daerah Pada Kabupaten Tulungagung Tahun 2015-2017" *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya* Vol. 7 No. 2 Tahun 2019

rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemerintah daerah (Halim, 2002:128), yaitu rasio kemandirian keuangan, rasio efektivitas terhadap pendapatan asli daerah, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio keserasian, rasio pertumbuhan, rasio proporsi pendapatan dan belanja daerah.

Faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan salah satunya adalah jumlah pendapatan yang diperoleh dan jumlah belanja. Pendapatan daerah yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah belanja maka kinerja keuangan dapat dikatakan berjalan dengan maksimal. Begitu juga sebaliknya, jika jumlah pendapatan daerah yang diperoleh lebih sedikit dibandingkan jumlah belanja yang dikeluarkan maka kinerja keuangan dikatakan kurang maksimal dan secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap perkembangan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian mengenai kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung dengan menggunakan rasio keuangan telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Beberapa diantaranya yaitu Leli Ekasari (2018), Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2016.⁷ Menunjukkan bahwa Pada tahun 2015 Rasio Kemandirian mencapai 60,8% jadi pada Kabupaten Tulungagung masih sangat besar tinggat ketergantungan terhadap pemerintah pusat atau pemerintah provinsi. Rasio efektivitas dalam pengumpulan pajak daerah dikatakan sangat baik karena mempunyai rata-rata

⁷ Leli Ekasari, "Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2016" *Jurnal Simki-Economic* Vol. 2 No. 11 Tahun 2018

111,33%. Dan pada efisiensi pajak daerah dikatakan baik karena rata-rata dari efisiensinya adalah 2,28% namun kurang tepat dalam penyajian suatu anggaran karena di dalam pembiayaan ini lebih besar SILPA yang diperoleh dari pada yang dianggarkan.

Penelitian Adiyatma Admaja, dkk (2021), Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Tulungagung Periode 2014-2018. Hasil penelitian bahwa tahun 2014 pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung dalam menjalankan proses desentralisasi daerah kinerjanya sebesar 13,2% dengan sisa 86,8% yang menunjukkan pemerintah masih belum maksimal dalam menjalankan proses desentralisasi daerah begitu pula dengan tahun lainnya. Tingkat ketergantungan keuangan daerah pemerintah cenderung menurun dari tahun 2014 dan 2015 sebesar 86,9%, selanjutnya tahun 2016 sebesar 86,7% sedangkan tahun 2017 sebesar 80,2% dan di tahun 2018 sebesar 79,8%. Hal ini menunjukkan pemerintah provinsi masih sangat mendominasi dalam pendanaan daerah di Kabupaten Tulungagung. Tingkat kemandirian menunjukkan bahwa pemerintah pusat memiliki peranan dominan dibanding kemandirian pemerintah daerah, sehingga kondisi tersebut dapat diartikan pemerintah daerah masih perlu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.⁸

Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang mempunyai banyak potensi yang dapat digali untuk dijadikan sumber pendapatan dari berbagai sektor. Perekonomian di

⁸ Adiyatma Admaja. dkk, "Analisis Kinerja Daerah Pemerintah....."

Kabupaten Tulungagung digerakkan oleh sektor pertanian, sektor pariwisata, sektor perikanan, sektor peternakan, sektor perdagangan, sektor industri yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.⁹ Salah satu contohnya Kabupaten Tulungagung terkenal dengan penghasil marmer terbesar di Indonesia, tidak hanya itu Kabupaten Tulungagung juga memiliki beberapa tempat wisata yang sangat indah untuk dikunjungi. Hal ini yang menjadi salah satu faktor bertambahnya pendapatan di daerah Kabupaten Tulungagung. Berikut tabel tentang pendapatan daerah dan belanja daerah Kabupaten Tulungagung pada tahun 2020-2022.

Tabel 1.1
Data Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 – 2022

Tahun	Pendapatan Daerah	Belanja Daerah	Belanja Pegawai
2020	2.598.322.054.180,68	2.259.814.000.402,12	1.087.178.725.221,42
2021	3.095.975.320.366,44	2.369.544.781.636,47	1.117.487.042.959,42
2022	2.642.478.582.447,22	2.495.191.263.569,23	1.105.948.316.423,44

Sumber : BPKAD Kab. Tulungagung

Pada tahun 2020 pendapatan daerah Kabupaten Tulungagung sebesar Rp. 2.598.322.054.180,68. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp. 3.095.975.320.366,44. Namun pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp. 2.642.478.582.447,22. Jika dibandingkan dengan jumlah belanja daerah yang telah dikeluarkan kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Tulungagung masih bisa dikatakan belanja dengan maksimal. Pada perbandingan pendapatan dan belanja daerah pada tahun 2021 misalnya, dengan pendapatan sebesar Rp. 3.095.975.320.366,44 dengan belanja daerah sebesar Rp. 2.369.544.781.636,47. Hal ini membuktikan bahwa jumlah belanja yang dikeluarkan tidak melebihi pendapatan. Selain itu jumlah

⁹ Leli Ekasari, “Analisis Kinerja Pengelolaan.....”

belanja pegawai pada tahun 2020 sebesar Rp 1.087.178.725.221,42. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan Rp. 1.117.487.042.959,42 namun pada tahun 2022 belanja daerah sempat mengalami penurunan menjadi Rp. 1.105.948.316.423,44

Melihat kondisi di Indonesia saat ini, terdapat beberapa pemerintah daerah yang masih bergantung pada transfer dana dari pusat. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan 433 pemerintah daerah dari total 503 pemerintah daerah di Indonesia berstatus belum mandiri dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Hal ini yang membuat pemerintah daerah masih bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. Selain itu berdasarkan pemeriksaan BPK terdapat 468 pemerintah daerah masih memegang status pengelolaan keuangan daerah yang sama sejak 2013 sampai 2020, yang artinya tingkat kemandirian fiskal mereka tidak berkembang selama kurun waktu tujuh tahun terakhir.¹⁰

Berdasarkan hasil *review* atas kemandirian fiskal daerah tahun 2019 menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sebagian besar pemerintah daerah masuk dalam kategori belum mandiri. Presiden Jokowi juga menjelaskan bahwa belanja negara 2019 akan diarahkan salah satunya dalam upaya penguatan desentralisasi fiskal yang ditandai dengan perencanaan alokasi transfer ke daerah dan dana desa. Namun keadaan tersebut malah membuat daerah ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Ketergantungan terhadap pusat justru lebih parah terjadi

¹⁰ BPK Aceh, "Belum Mandiri, 88 Persen Pemda Bergantung pada Transfer Pusat" dalam <https://aceh.bpk.go.id/belum-mandiri-88-persen-pemda-bergantung-pada-transfer-pusat/> Diakses 18 Oktober 2023

pada pemerintah daerah kota/Kabupaten. Padahal level kota/Kabupaten ini merupakan titik berat otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.

Melihat kondisi tersebut maka melakukan analisis terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dapat menilai keberhasilan pemerintah dalam mengelola keuangan daerah. Penelitian ini peneliti menggunakan rasio keuangan efektivitas dan efisiensi untuk melihat kinerja keuangan daerah Kabupaten Tulungagung. Kemudian hasil analisis rasio tersebut akan dianalisis lagi menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA) untuk membantu menganalisis tingkat efisien keuangan daerah.

Peneliti memilih Kabupaten Tulungagung sebagai tempat penelitian karena Kabupaten Tulungagung memiliki banyak potensi yang dapat digali untuk dijadikan sumber pendapatan dari berbagai sektor. Perekonomian Kabupaten Tulungagung secara dominan digerakkan dari sektor pertanian, pariwisata, perikanan, peternakan, perdagangan, dan sektor industri yang dapat meningkatkan PAD. Melihat dari data pendapatan daerah Kabupaten Tulungagung pada tahun 2020-2022 di tabel 1.1 bahwa Kabupaten Tulungagung memiliki pendapatan daerah yang lebih tinggi daripada belanja daerah yang dikeluarkan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui kinerja pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam mengelola keuangan daerahnya pada tahun 2020 – 2022, serta untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa laporan kinerja keuangan Kabupaten Tulungagung sudah transparansi. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti

tertarik untuk melakukan penelitian dan membahas masalah tersebut dengan judul “**Analisis Tingkat Efisiensi Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Tulungagung Pada Periode 2020-2022 Dengan Menggunakan *Data Envelopment Analysis (DEA)***”

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka peneliti menemukan permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Pada beberapa tahun terakhir tingkat ketergantungan dan kemandirian Pemerintah Kabupaten Tulungagung terhadap pemerintah pusat/provinsi masih dalam kategori tinggi, sehingga kondisi ini dapat diartikan bahwa pemerintah daerah masih perlu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mengelola keuangan daerah.
2. Rendahnya kemampuan daerah dilihat dari realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil dibandingkan dengan belanja daerah yang dikeluarkan.
3. Kurangnya usaha dan kemampuan dalam menggali dan mengelola sumber daya pendapatan yang ada di kabupaten Tulungagung.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja keuangan daerah Kabupaten Tulungagung periode 2020-2022 jika dilihat dari rasio efektivitas?

2. Bagaimana kinerja keuangan daerah Kabupaten Tulungagung periode 2020-2022 jika dilihat dari rasio efisiensi?
3. Bagaimana kinerja keuangan daerah Kabupaten Tulungagung periode 2020-2022 dengan menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA) untuk mengetahui tingkat efisiensi?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan daerah Kabupaten Tulungagung periode 2020-2022 jika dilihat dari rasio efektivitas
2. Untuk mengetahui kinerja keuangan daerah Kabupaten Tulungagung periode 2020-2022 jika dilihat dari rasio efisiensi
3. Untuk mengetahui kinerja keuangan daerah Kabupaten Tulungagung periode 2020-2022 dengan menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA) untuk mengetahui tingkat efisiensi

E. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan ilmu pengetahuan dan informasi sebagai pembanding penemuan-penemuan peneliti sebelumnya mengenai pemahaman kinerja keuangan daerah yang dapat ditinjau dari beberapa rasio keuangan.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai tambahan bahan referensi dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah, sehingga diharapkan masing-masing pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sumber Pendapatan Asli Daerah dan sebagai masukan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

b) Bagi Penulis

Untuk menemukan bukti empiris tentang kinerja keuangan pemerintah daerah yang diteliti, serta untuk membandingkan teori yang didapat dari studi kuliah dengan kenyataan yang sebenarnya.

c) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sumber referensi dengan meningkatkan kualitas penelitian selanjutnya yang sejenis.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah batasan untuk memudahkan dalam pelaksanaan penelitian agar lebih efektif dan efisien, sehingga peneliti dapat memisahkan aspek tertentu dengan objek yang diteliti. Sedangkan batasan masalah adalah upaya untuk menetapkan ruang lingkup penelitian. Batasan masalah bertujuan untuk mengidentifikasi faktor apa saja yang termasuk ruang lingkup masalah serta apa saja yang tidak termasuk dalam ruang lingkup masalah

penelitian. Berdasarkan identifikasi tersebut peneliti memberi batasan masalah yang diteliti agar lebih spesifik yaitu mengenai rasio efektivitas dan rasio efisiensi terhadap kinerja keuangan.

Dalam penelitian ini untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Tulungagung. Variabel bebas dalam penelitian adalah rasio keuangan. Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Tulungagung Periode Tahun 2020-2022.

2. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup penelitian di atas, maka penelitian ini menggunakan data dari website BPKAD dan BPS Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini hanya dibatasi Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tulungagung Periode 2020-2022.

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

a. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja Keuangan Daerah adalah gambaran tentang tingkat pencapaian pelaksanaan pemerintah daerah dalam suatu kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan dalam periode tertentu. Kinerja keuangan daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk mengelola sumber keuangan yang terdapat pada daerah itu sendiri untuk memenuhi kebutuhan dan

mendukung dalam proses berjalannya suatu pemerintahan, pembangunan daerah, dan pelayanan kepada masyarakat.¹¹

b. Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas dalam mengembangkan suatu daerah. Rasio ini dapat dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD.

c. Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi adalah rasio yang digunakan untuk mengukur penggunaan pendapatan dalam mengembangkan suatu daerah. Rasio ini dapat dihitung dengan cara membandingkan tingkat pengeluaran belanja terhadap realisasi pendapatan.¹²

d. Metode *Data Envelopment Analysis* (DEA)

Metode *Data Envelopment Analysis* (DEA) yaitu pendekatan non-parametrik yang berbasis program linear untuk mengevaluasi efisiensi relatif dari unit pengambilan keputusan dengan cara membandingkan *Decision Making Unit* (DMU).

2. Definisi Operasional

Berdasarkan penjelasan definisi konseptual di atas, maka definisi operasional yang dimaksud dalam penelitian ini adalah “Analisis Tingkat Efisiensi Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Tulungagung Pada

¹¹ Dessy Ari dan Sri Trisnarningsih, “Pengaruh Kemandirian, Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 22 No. 3 Tahun 2022 hlm 1573

¹² Mahmudi, “Analisis Laporan Keuangan Daerah”, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2019), hlm 140

Periode 2020-2022 Dengan Menggunakan *Data Envelopment Analysis* (DEA)”. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung yang dilihat dari rasio efektivitas, efisiensi dengan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA).

H. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab ini peneliti menjelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini peneliti menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan yang sesuai dengan permasalahan, penelitian terdahulu, kerangka konseptual.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini peneliti menguraikan yang berkaitan dengan pendekatan penelitian dan jenis penelitian, populasi, dan sampel penelitian, sumber data, variabel dan skala pengukuran teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini peneliti menguraikan yang berkaitan dengan hasil penelitian dan hasil analisis data.

BAB V : PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti menguraikan yang berkaitan dengan pembahasan data penelitian dan hasil data.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini peneliti menguraikan yang berkaitan dengan kesimpulan dan saran. Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, lampiran – lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi, dan daftar riwayat hidup.